

Kewenangan Pengadilan Niaga



SEJARAH PENGADILAN NIAGA DI INDONESIA

Pada tanggal 22 April 1998 diberlakukan PERPU Nomor 1 Tahun 1998 dan selanjutnya di sahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 melahirkan PENGADILAN NIAGA di Indonesia.



- **Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 (UUK).

Meliputi wilayah hukum pada:

- DKI Jakarta
- Propinsi Jawa Barat
- Propinsi Sumatera Selatan
- Propinsi Lampung
- Propinsi Kalimantan Barat



- **Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Makassar**

Dibentuk berdasarkan SK Presiden Nomor 97 Tahun 1999.

Meliputi wilayah hukum pada:

- Propinsi Sulawesi Selatan
- Propinsi Sulawesi Tenggara
- Propinsi Sulawesi Tengah
- Propinsi Sulawesi Utara
- Propinsi Maluku
- Propinsi Irian Jaya



- **Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya**

Dibentuk berdasarkan SK Presiden Nomor 97 Tahun 1999.

Meliputi wilayah hukum pada:

- Propinsi Jawa Timur
- Propinsi Kalimantan Selatan
- Propinsi Kalimantan Tengah
- Propinsi Kalimantan Timur
- Propinsi Bali
- Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
- Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)



- **Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang**

Dibentuk berdasarkan SK Presiden Nomor 97 Tahun 1999.

Meliputi wilayah hukum pada:

- Propinsi Jawa Tengah
- Propinsi DI Yogyakarta



- **Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan**

Dibentuk berdasarkan SK Presiden Nomor 97 Tahun 1999.

Meliputi wilayah hukum pada:

- Propinsi Sumatera Utara
- Propinsi Riau
- Propinsi Sumatera Barat
- Propinsi Bengkulu
- Propinsi Jambi
- Propinsi DI Aceh



Disamping berwenang mengadili Perkara Kepailitan dan PKPU, Pengadilan Niaga juga berwenang mengadili perkara di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

- Memeriksa dan memutus sengketa Kepailitan dan PKPU (UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)
- Memeriksa dan memutus sengketa HAKI:
 - Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000)
 - Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No. 32 Tahun 2000)
 - Paten (UU No. 13 Tahun 2016)
 - Merek (UU No. 20 Tahun 2014)
 - Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014)
- Memeriksa dan memutus sengketa Proses Likuidasi Bank Yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) - (UU No. 24 Tahun 2004)

Suka dengan konten dan informasi sekilas hukum ini?

follow dan kunjungi website kami atau silahkan hubungi tim legal kami
thank u.



Menara Bidakara 2, Lt. 16
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73
Jakarta Selatan 12870
Telp. +62 21 2906 9374
WA. +62 813 8870 2323



Like



Comment



Share



Save



@gkl.network



admin@gklegalnetwork.com



www.gklegalnetwork.com